



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI PERDAGANGAN RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V (Lima)
Rapat Ke- : 27 (Dua puluh tujuh)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 8 Juli 2024
Waktu : Pukul 15.13 s.d. 16.27 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI,
Gedung Nusantara I Lt. 1,
Jl. Jend. Gatot Subroto,
Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Mohamad Hekal, M.B.A.
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P.Gerindra)
- Acara : 1. Pembahasan mengenai Rencana Pengesahan
Persetujuan Preferensi Perdagangan antara
Pemerintah Republik Indonesia dengan
Pemerintah Republik Iran (*Preferential Trade
Agreement between The Government of The
Republic of Indonesia dan The Government of
The Islamic Republic of Iran*);
2. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.,
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
33 dari 55 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F- PDIP)**

10 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima, S.Sos.
2. Adisatrya Suryo Sulisto
3. Prof. (Assc). Dr. Darmadi Duriyanto, S.E.,
M.B.A.
4. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
5. Sonny T. Danaparamita, S.H.
6. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
7. Sondang Tiar Debora Tampubolon, S.T.
8. dr. H. Mufti Aimah Nurul Anam
9. Dr. Ir. Harris Turino, S.H., M.Si., M.M.
10. I Nyoman Parta, S.H.

- 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F- PG)**
6 dari 8 orang Anggota
 1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
 2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
 3. H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M.
 4. Doni Akbar, S.E., M.M.
 5. Trifena M. Tinal, B.Sc.
 6. Drs. Dadang S. Muchtar

- 3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F- P. GERINDRA)**
3 dari 8 orang Anggota
 1. Mohamad Hekal, M.B.A.
 2. Khilmi
 3. Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A.

- 4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- P. NASDEM)**
3 dari 6 orang Anggota
 1. H.P. Martin Y Manurung, S.E., M.A.
 2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P
 3. H. Subardi, S.H., M.H.

- 5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F- PKB)**
3 dari 6 orang Anggota
 1. Ir. H. M. Nasim Khan
 2. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.
 3. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.

- 6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F- PD)**
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si.
 2. Muslim, S.Hl., M.M.
 3. Hj. Melani Leimena Suharli

- 7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F- PKS)**
3 dari 4 orang Anggota
 1. Amin Ak, M.M.
 2. Hj. Nevi Zuairina
 3. H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F- PAN)**

2 dari 4 orang Anggota

1. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
2. Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F- PPP)**

0 dari 2 orang Anggota

-

B. PEMERINTAH/UNDANGAN:

Menteri Perdagangan (Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan,
S.E., M.M) beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI
DPR RI):**

**Yang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Perdagangan
Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, beserta jajarannya,
termasuk Pak Wamen, Pak Jerry, selamat datang,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa taala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI hari ini dengan dalam keadaan sehat *walafiat*.

Sesuai dengan laporan dari Sekretariat Komisi VI, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 27 orang dengan 10 izin dari 7 fraksi, sehingga forum, *eh* kuorum yang telah terpenuhi sebagaimana ditentukan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Pasal 276 ayat (1). Maka, perkenankan saya membuka Rapat Kerja pada hari ini dan Rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.13 WIB)**

Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia atas kehadirannya pada rapat kerja pada hari ini dalam rangka Rencana Pengesahan Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran atau *Preferential Trade Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Iran*.



Untuk itu, saya juga minta persetujuan kepada hadirin, bahwa rapat kita langsung sampai pukul, berapa ya? Jam 4, *wah*, luar biasa. *Oke*, sampai jam 4 ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan. *Eh* maaf, mohon maaf, saya harus baca dulu kronologis.

Pada tanggal 26 September 2023, DPR telah menerima Surat Presiden Nomor R-47/Pres/IX/2023, perihal: Rencana Pengesahan Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran.

Kemudian, pada tanggal 9 November 2023, melalui Surat Nomor T-844/PW/11/01/11/2023, Komisi VI telah menerima penugasan dari Pimpinan DPR RI untuk membahas Rencana Pengesahan Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran, sehingga hari ini kita bertemu dalam raker agar mendapat penjelasan dari Pak Menteri yang mewakili pemerintah untuk menyampaikan pemaparan lebih mendalam tentang perjanjian tersebut dan nanti kita akan selesaikan dengan keputusan.

Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Menteri Perdagangan.

Silakan, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

Pimpinan, dan Wakil Pimpinan yang saya hormati,
Pak Haikal selamat kembali ke tanah air, mudah-mudahan menjadi haji yang *mabrur*,

Saya juga ulangi, rapat dulu pernah saya sampaikan, kami turut berduka cita mendalam atas berpulangnya Ibunda. Saya waktu itu datang ke rumah, cuma rupanya di masjid, saya kejar ke masjid, baru berangkat. Akhirnya, saya telepon Pak Fuad. Turut berduka cita mendalam.

Anggota Komisi VI yang terhormat,

Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi VI DPR RI yang telah mengagendakan dan mengundang kami pada rapat kerja hari ini, membahas Rencana Pengesahan Persetujuan Preferensi



Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran (*Preferential Trade Agreement between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Islamic of Iran*) sekaligus menentukan instrumen ratifikasi Indonesia-Iran, *preferential Trade Agreement* atau persetujuan preferensi perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran.

Merujuk Pasal 84, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Bab 12 tentang Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Surat Presiden Nomor R-47/Pres/09/2023, tanggal 23 September 2023, perihal: Rencana Pengesahan Perjanjian ini yang telah diterima oleh Ketua DPR RI untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

Pimpinan, dan Anggota Komisi yang terhormat,

Pada periode 5 tahun terakhir, 2019-2023, neraca perdagangan Indonesia, kita syukuri, selalu mencatat *surplus*. Tahun 2023 total perdagangan kita 206,9 juta ekspor dan impornya 195,1 juta dolar, sehingga kita *surplus*. Oh ini salah, dengan Iran ini ya. Dan impor 11,7 juta, sehingga kita *surplus* 183 juta. Memang masih kecil, Pak, 183 juta.

Iran merupakan negara terbuka dengan posisi strategis, sehingga potensial menjadi *hub* perdagangan Indonesia Kawasan Timur Tengah atau Asia Tengah, juga bisa ke Asia Selatan. Iran juga pasar potensial bagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang 88 juta jiwa.

Struktur tarif Iran yang relatif tinggi, itulah menjadi hambatan utama produk Indonesia untuk lebih berdaya saing. Preferensi tarif II-PTA atas jumlah produk ekspor utama Indonesia akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Iran dan kawasan sekitarnya, sehingga akan meningkatkan *surplus* neraca perdagangan kita ke sana.

Persetujuan ini, persetujuan II-PTA ini ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2003 di Istana Bogor oleh Menteri Perdagangan kedua negara, dengan disaksikan oleh Presiden Iran dan Presiden, Presiden Indonesia dan Presiden Iran.

Ini merupakan persetujuan dagang kedua Indonesia dengan negara di kawasan Timur Tengah dan persetujuan dagang pertama Indonesia yang memiliki pengaturan imbal dagang, *countertrade*, yang sekarang mulai banyak permintaan, termasuk Mesir juga minta *countertrade*, sebagai satu alternatif transaksi perdagangan.

Indonesia mendapat penghapusan dan penurunan tarif atas 239 pos tarif, meliputi produk mineral, produk industri, ada makan olahan, ada farmasi, karet, kertas, tekstil, kayu lapis dan lain-lain. Produk pertanian, sawit, minyak sawit ya, minyak nabati lainnya, kakau, tembakau, kopi, teh, rempah-rempah, buah-buah dan sayur-sayuran, dan juga produk ikan, perikanan atau ikan.



Indonesia-Iran PTA akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Iran menjadi diperkirakan bisa sampai setengah miliar dolar di tahun 2030. Dengan demikian Indonesia akan menikmati *surplus* yang lebih banyak, *gitu*.

Memang kita harus gigih, ekspor kita meningkat terus. Tapi tahun 2023, volumenya sedikit turun, tapi nilainya turunnya banyak. 2024, volumenya mungkin tetap, tapi nilainya juga turun. Oleh karena itu, memang kita harus kreatif mencari alternatif-alternatif dengan pasar-pasar non tradisional yang baru.

Upaya mitigasi implementasi II-PTA melalui sosialisasi kepada seluruh *stakeholder*, serta optimalisasi *Free Trade Agreement Center* dan perwakilan luar negeri sebagai pendukung implementasi persetujuan II-PTA ini.

II-PTA diharapkan dapat segera disahkan dengan peraturan presiden, mempertimbangkan materi muatan yang diatur tidak menimbulkan akibat yang luas, karena *preferential* ini kan terbatas ya, yang disepakati saja, dia bukan komprehensif, sehingga manfaatnya dapat segera kita peroleh dan diperoleh oleh pelaku usaha dan kita harapkan ini bisa kita informasikan pada awal tahun 2025.

Saya kira itu,

Ketua, dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat,

Penjelasan singkat mengenai Rencana Pengesahan Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kerja sama, kontribusi positif, Pimpinan, Anggota Komisi VI DPR RI, kami optimis ratifikasi II-PTA ini akan membawa dampak positif bagi perdagangan dan perekonomian kedua negara.

Terima kasih.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kami tadi sebelum rapat raker ini dimulai, sudah mengadakan rapat internal komisi yang secara keputusan kita sudah, sudah putuskan bahwa kita akan mendukung untuk ini diselesaikan secara perpres. Namun tentunya,



teman-teman ingin mendalami dan menyampaikan juga *concern-concern* yang harus menjadi catatan bagi Kementerian Perdagangan untuk memantau dan memitigasi, mungkin apa yang dampak-dampak negatif atau yang dikhawatirkan oleh teman-teman di komisi.

Maka, untuk itu saya buka sesi pendalaman dan kita mulai dengan Saudara Mufti Anam.

Silakan, Mas.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan, dan seluruh,
Pak Mendag beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini,**

Pertama, tentu kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak. Karena, di tengah situasi yang tidak mudah ini, Pak Menteri masih terus kami lihat, kami pantau, berikhtiar untuk menghadirkan yang terbaik buat rakyat kita, Pak.

Untuk mengomentari soal ratifikasi, tadi kawan-kawan sudah rapat internal. Saya pikir sudah selesai mungkin, karena kita semua sudah sepakat, karena lagi-lagi kita tidak bisa hari ini menutup diri, kita perlu terbuka untuk bisa menang di era yang kompetitif ini, Pak.

Nah, cuma yang kedua, saya lihat tadi dari daftar pertanyaan tidak ada dari teman-teman PAN begitu. Biasanya teman-teman PAN itu, *wah* selalu terdepan kalau Pak Menteri, kalau bukan Menteri Perdagangan, ya kan? Saya lihat ke mana teman, apalagi Pak Eko ini. Jadi, Pak Eko, Pak Jon Efrizal ya *kan*, Bu ini, Bu Intan, itu jadi macan Senayan, Pak, kalau enggak ada Bapak, Pak.

Ini ada Bapak ini dari tadi, saya dikasih kue kotak berapa ini sama beliau ini tadi. Iya dan agresif, untuk bagaimana memberikan pengaruh kepada teman-teman yang lain begitu. Enggak, tapi luar biasa, Pak. Artinya, mereka saya lihat, bukan hanya mereka, kami saja, Pak, dengan Pak Menteri itu, jujur, saya tidak kenal sama Pak Menteri, nomor HP-nya tidak punya, tapi saya segan sama Beliau. Saya *follow*, saya, menteri, Bapak cek di Instagram saya, saya tidak pernah *follow* menteri lain kecuali Bapak. Betul. Iya, iya.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Cuman saya, saya gagal sama Beliau.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):



Iya.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Saya gagal, Pak.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Cuman harapan kami ya, kita yang belajar jadi baik, karena.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Dulu, Dulu saya ngajak, Pak.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Betul.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Sama kakaknya, tapi enggak berhasil. Memang PDI.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Amin, amin.

Iya, Pak. Kami belajar banyak 4 tahun di DPR, kita teriak-teriak, kita apa, hanya nambah musuh *aja*, Pak. Maka, di tahun kelima ini harapan kami, kita jadi anak baik. Kita bisa menjadi binaan Bapak ke depan, *gitu aja*, Pak, ya. Iya.

Cuman, rasanya kalau kami duduk di tempat ini, kami tidak menyampaikan sesuatu *kok* sepertinya kami ini bukan DPR begitu, Pak. Bapak kan pernah duduk juga di tempat ini begitu. Nah, kami hanya ingin menyampaikan apa sedikit masukan dari rakyat kami, Pak. Ya, tentu Bapak kami lihat sudah luar biasa, tinggal dari kementerian terkait, ke pertanian dan pokoknya semua yang terkait dengan pangan, untuk bagaimana bapak turut mengingatkan mereka, Pak. Karena, Bapak tahu hari ini beras, gula, minyak goreng itu semakin hari kami pantau terus meningkat, Pak, harganya. Karena kalau kita lihat, bahwa sekarang ini ada fenomena baru bahwa kenaikan harga pangan tidak lagi karena adanya penimbunan, Pak, tapi justru kami lihat karena adanya mafia dan ini saya lihat oleh, mohon maaf, oleh oknum-oknum yang tentu di luar Bapak tadi itu dimainkan, begitu, Pak.

Rakyat kita mau teriak tidak berani, Pak. Karena kita tahu negara hari ini mereka diberikan mandat oleh rakyat, tapi justru mengekang rakyat, mencekik rakyat, tidak memberikan ruang kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, Pak.



Maka, kami sebagai wakil rakyat di sini, menyampaikan kepada Bapak yang menurut kami sudah sangat luar biasa, apalagi didampingi selalu oleh kawan kami Pak Eko ini, ya *kan*. Kami yakin Bapak berupaya terus melakukan yang terbaik. Tapi harapan kami, Bapak bisa mengajak elemen yang lain untuk tidak main-main dalam persoalan rakyat.

Itu *aja*, Pak. Sebenarnya, saya punya enam lembar di sini, tapi *eh* saya lihat dari kawan-kawan PAN tadi sudah sangat luar biasa menyampaikan di luar ruangan. Terima kasih banyak, Pak, sekali lagi.

Matur nuhun.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Ya, baik, Ibu Evita.

Tapi begini, karena ini kita mau menyampaikan persetujuan terhadap perjanjian perdagangan, kalau bisa kita *fokusin* komentarnya terhadap ini dulu.

Silakan, Bu Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Baik, terima kasih.

**Bapak Pimpinan,
Pak Menteri,
Pak Wamen dan jajaran yang saya hormati,**

Terima kasih, Pak, atas penjelasan tadi yang diberikan. Pada prinsipnya, menurut saya penandatanganan perundingan Indonesia-Iran ini momentum yang sangat penting. Bapak katakan tadi bagaimana ke depan, kita bisa meningkatkan neraca perdagangan kita dengan Iran.

Dan tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah perjanjian perdagangan kita dengan Timur Tengah yang kedua. Bagi Iran, ini baru yang pertama, *kan* begitu, Pak. Jadi, mereka mem-*positioning* kita sebagai negara yang penting, *kan* begitu, Pak, walaupun tadi disampaikan, Bapak katakan ini sebenarnya perundingan ini sudah tujuh putaran, *kan* begitu kalau saya baca di ininya Bapak *nih*.

Pada waktu tahun 2020, Pak. Memang situasinya *kan* berbeda pada waktu itu, Pak. Kita tahu bahwa Iran itu menandatangani perjanjian dengan



negara 5 plus 1, *kan* begitu, Pak. Ada Amerika, RRT, Rusia, Prancis, Inggris dan Jerman.

Pada saat itu, *hah?* Pada saat itulah kita melakukan, membuka, perjanjian-perjanjian dengan Iran. Nah saya hanya ini saja, Pak. Tentunya kita enggak memikirkan kepentingan negara lain, kepentingan nasional dikedepankan. Hanya kita minta dalam menyepakati daripada perjanjian ini, geopolitik akhir-akhir ini juga menjadi pertimbangan. Kita tahu bagaimana sikap Amerika terhadap Iran dengan serangan yang dilakukan Iran terhadap negara lain. Apakah ini nanti akan berdampak terhadap kita Indonesia atau tidak? Nah, ini juga saya minta ini bisa, apa namanya, menjadi pertimbangan dari Pak Menteri.

Dan juga di halaman yang Bapak berikan ini, Pak. Bapak *kan* sudah sebutkan, Iran itu apa penghapusannya, Indonesia itu apa penghapusannya?. Apapun ini, Pak, ke depan, hanya dilihat saja. Apakah ini sudah *mutual benefit?* Karena sekarang kita lihat, kalau Iran ini *kan* dia dengan masalah yang dihadapi ke Amerika tentunya tujuan ekspor dia ke kita nanti lebih besar, geopolitik lagi, Pak.

Saya dengar tadi disampaikan teman-teman bahwa sampai saat ini, Pertamina saja itu tidak berani impor dari Iran. Nah, bagaimana ketika kita menandatangani atau meratifikasi perjanjian ini, *kan* enggak bisa menolak lagi ya Pak Menteri ya, kalau sudah ditandatangani. Nah, ini tentu harus ada koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian lain, maupun instansi dan lembaga lain di dalam hal ini.

Saya rasa itu saja, kalau mengenai apakah itu dengan undang-undang, apakah itu dengan perpres, apa harapan Pak Menteri sudah jelas di dokumen ini, karena waktu yang memang sudah lewat waktunya, ya akan disahkan secara dengan melalui perpres.

Saya rasa demikian, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

(gangguan pada mic)

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya pikir sudah tadi di internal sudah kita bahas, bagaimana peningkatan kerja sama antara Iran dan Indonesia melalui Kementerian Perdagangan yang sudah disepakati, yang bersetujuan dengan surat dari presiden kita sendiri, dan itu mungkin bisa lebih cepat lebih baik.



Dan seandainya itu dibacakan langsung secara pandangan fraksi masing-masing, sehingga langkah selanjutnya itu bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan kita di DPR.

Saya kira itu, mungkin bisa lebih cepat lebih baik. Kalau perlu membacakan pandangan fraksi masing-masing bergantian, bisa diserahkan kepada Kementerian Perdagangan.

Saya kira itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

(gangguan pada mic)

WAKIL KETUA RAPAT (ARIA BIMA, S.Sos/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nyala, nyala.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Udah, udah tuh. Udah, udah nyala.

Silakan, Pak Adi.

F-PDIP (ADISATRYA SURYO SULISTO):

Terima kasih, Pak Hekal.

**Pak Menteri,
Pak Wamen beserta jajaran,
Pimpinan, dan juga
Rekan-rekan Komisi VI,**

Saya kira poin-poin utama tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Pada intinya kami mendukung *preferential trade agreement* antara Indonesia dengan Iran.

Kalau kita lihat, Iran dan Indonesia ini, kedua, dua-duanya adalah negara besar. Tetapi kalau kita lihat hubungan perdagangannya, dari statistiknya ini masih sangat kecil. Ya, walaupun kita mendapati *trade surplus*, tetapi dari segi nilai, apalagi melihat potensi antara kedua negara ini, masih sangat-sangat kecil. Tentu kita harapkan ke depan dengan adanya Indonesia-Iran PTA ini akan lebih meningkatkan hubungan dagang kedua negara.

Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Evita, bahwa ya kita ketahui posisi Iran dalam perpolitikan dunia ini *kan* juga posisinya, ada hal-hal yang sensitif terutama terhadap negara barat ya. Ini yang harus diperhatikan juga oleh Pak Menteri, bagaimana nanti dari segi implementasi untuk meningkatkan perdagangan.

Dunia usaha juga tentunya mau berdagang dengan aman, Pak. Apalagi dunia usaha, perusahaan-perusahaan Indonesia yang berdagang bukan hanya ke Iran, nantinya kalau dibuka atau ditingkatkan dan negara barat. Ya, jangan nanti perusahaan-perusahaan ini dipersulit berdagang dengan barat, karena mereka berhubungan dengan Iran.

Nah, hal-hal ini yang juga mesti dipastikan tidak akan terganggu ya, Pak Menteri. Jadi, itu permintaan dari kami, tentunya kita berharap ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi kedua negara, utamanya untuk Indonesia. Dan kita harapkan kalau nanti sudah diratifikasi, kami juga meminta untuk dilakukan sosialisasi kepada para *stakeholders*, pelaku UMKM, dunia usaha, terkait manfaat dan tantangan berdagang dengan Iran.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Menteri.

Terima kasih.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, Pak Haris. Silakan.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan, dan
Rekan-rekan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Pak Menteri,
Pak Wamen, beserta jajaran, serta
Pak Stafsus ini pelari tangguh, Pak Bara,**

Jadi pada prinsipnya, kami sepakat, Pak, bahwa ini dilakukan dengan perpres, *toh* waktunya sudah lewat. Tapi, ada beberapa masukan yang ingin saya sampaikan.

Yang pertama, dari paparan Pak Menteri, ini komitmennya hanya berupa penurunan tarif, Pak, ya? Padahal dari isu awal ada penghapusan tarif, Pak, ya. Jadi, yang berlaku yang mana, Pak? Apakah hanya penurunan saja atau sampai ke penghapusan untuk beberapa produk? Ini yang pertama.



Yang kedua, apa alasannya memilih *Preferential Trade Agreement* (PTA), bukan CEPA, Pak? Seharusnya CEPA *kan* lebih komprehensif, produknya lebih banyak tidak dibatasi, tentu ada latar belakangnya. Apakah pemilihan PTA ini akan menguntungkan atau lebih menguntungkan Indonesia atau sebaliknya, Pak? Itu yang kedua, Pak.

Yang ketiga, izin, Pimpinan. Saya menggunakan kesempatan ini sekaligus karena *ketemu* Pak Menteri. Ini *kan* kita tahu, Pak, banyak industri di Indonesia berguguran, Pak. Isunya bahkan pabrik tekstil akan gugur 120 pabrik. Kalau 1.000 saja karyawannya, berarti 120.000. Nah, Pak Menteri kemudian juga muncul di media, akan mengenakan tarif sebesar 200% ya. Belum jelas memang, belum keluar, tapi isunya sudah ada di media. Nah, tentu ini *kudu* dibicarakan dengan *stakeholders*, Pak. Dibicarakan dengan pelaku industri, dibicarakan dengan asosiasi, KADIN misalkan, karena ini akan menyangkut bahan baku kita banyak dari China. Dan juga satu hal lagi adalah kita harus pikirkan reaksi balasan, karena mereka tidak akan diam, kalau kita kenakan 200%, mereka juga akan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih parah lagi. Kira-kiraantisipasi Pak Mendag seperti apa?

Terima kasih.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik.

Walaikumsalam,

Pak Muslim, silakan, Pak.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan, dan
Rekan-rekan Komisi VI,
Pak Menteri, Pak Wamen, sini Pak Menteri, Pak Menteri, Pak Wamen, dan
jajaran Kementerian Perdagangan,**

Pertama, tentu saya tidak memperpanjang, Pak Menteri. Tadi sudah diskusi banyak di rapat internal komisi. Namun demikian, tentu kita bersyukur, Pak Menteri, hari ini ada satu harapan, kita anggap harapan. Harapan dalam dunia perdagangan khususnya antara Indonesia dan Iran ya.

Kemudian mengacu kepada halaman 5. Kalau saya melihat di sini, komitmen perdagangan barang Indonesia dan Iran. Kalau kita lihat dari sisi komitmen dalam konteks penghapusan maupun penurunan tarif ini, antara Iran dan Indonesia ini, saya pikir ada hal yang sangat positif, khususnya berkaitan dengan harapan, baik dari sisi produk mineral, produk industri, maupun produk pertanian.

Apakah produk-produk yang di sini, ada enggak di luar ini, Pak Menteri? Ya *kan*? Kalau apakah ada dan lain-lain atau tidak? Nah, itu, Pak Menteri, mungkin bisa dijelaskan sedikit buat kami juga, di samping produk-produk yang mendapatkan penghapusan atau penurunan tarif, ada enggak produk-produk lain, sehingga kita juga punya gambaran.

Yang kedua, tentu pasti Pak Menteri sudah menghitung betul bagaimana misal dari sisi produk industri, misal makanan olahan dan lain-lain, khususnya berkaitan dengan produk-produk kayu, mesin dan alat-alat.

Yang kedua, memang kalau kita lihat dari sisi Iran, misalnya. Ini masuk termasuk juga farmasi, aluminium, mesin dan lain-lain, sehingga kita harapkan dengan perdagangan ini jangan sampai kita yang dirugikan, Pak Menteri. Apalagi hari ini kita tahu betul banyak negara-negara juga yang menikmati keuntungan, termasuk khususnya di sektor sumber daya alam misalnya, nikel dan lain-lain, ya. Ini saya pikir bisa jadi catatan buat Pak Menteri, sehingga harapan kita apa yang dilakukan Indonesia dan Iran ini betul-betul memberikan dampak keuntungan yang besar, baik sisi industri maupun sisi kepentingan masyarakat.

Pada prinsipnya, kami sangat setuju, Pak Menteri, karena ini adalah kepentingan yang lebih besar buat bangsa dan negara, khususnya dalam dunia ekspor maupun impor. Tentu kita berharap, ini bisa segera dilaksanakan dan kita sudah sepakati tadi, karena ini lebih efektif dan lebih cepat melalui perpres, kita harapkan ini juga bisa ditindaklanjuti secepatnya.

Terima kasih, Pimpinan.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Dari Anggota sudah habis, ada lagi?

Udah lah, PDIP udah banyak, kenapa?

F-PKS (AMIN Ak, M.M.):

Satu, PKS.



KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh iya, PKS belum. Silakan.

F-PKS (AMIN Ak, M.M.):

Terima kasih.

**Pimpinan, dan Anggota,
Pak Menteri, Wamen,
Pak Sekjen dan semua jajaran saya hormati,**

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman dan tadi sudah dibahas di rapat internal. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, Pak Menteri, tadi disampaikan oleh Pak Adi juga, ini Indonesia negara besar, Iran negara besar. Transaksi dagang kita 2023 cuma 206 juta ya, US Dollar, dengan nilai ekspor 195 dan itu hanya 1,08, ya anggaph 1% dari transaksi dagang kita dengan negara Timur Tengah *gitu*, yang memang ini agak menggelitik, Pak, pertanyaannya, kenapa *gitu*? Iya, apakah bentuk perjanjiannya yang PTA itu atau karena pengusaha kita takut kalau berhubungan dengan Iran nanti tidak bebas untuk apa namanya, bertransaksi dagang dengan negara-negara lain, Eropa misalnya, atau apa? Itu Pak pertanyaan saya.

Memang agak menggelitik itu, menurut saya. Ya, kita apresiasi, Pak, dengan nilai surplus itu ya. Kita surplus lumayan sampai 3 triliun, cuma dengan apa namanya, peluangnya yang mestinya, karena sama-sama negara besar, mungkin bisa lebih besar dari itu.

Itu *aja*, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, terima kasih.

Kenapa? *Udah* terakhir memang.

Silakan, Bu.

F-PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan, dan Teman-teman Komisi VI,
Pak Menteri Perdagangan, Pak Wamen, beserta**



Seluruh jajaran,

Saya tadi disenggol Pak Mufti, PDIP. Jadi, saya bertanya yang terakhir, kalau boleh, Pak Menteri.

Pak Ketum saya yang terhormat,

Pak, jadi kalau kita bicara perjanjian internasional, mungkin saya tidak lagi bicara ini, karena teman-teman sepakat bahwa ini dengan perpres, tapi mengenai perjanjian impor, Pak.

Jadi kita tahu, akhir-akhir ini banyak sekali keluhan terutama dari para pengusaha yang menolak adanya Permendag 8/2024, revisi dari Permendag 3/2023 dan ini menurut mereka sangat berimbas, apakah itu kepada perjanjian-perjanjian yang sudah, sudah terjadi kemudian menjadi batal, lalu kemudian juga IKM-IKM, UKM konveksi, dan sebagainya.

Mohon penjelasan Bapak selaku Menteri Perdagangan, karena tentu kita tidak mau *turbulance* ini terjadi. Apakah memang benar bahwa produk-produk impor TPT, besi baja, dan sebagainya ini tidak mensyaratkan lagi sebagaimana dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di Permendag 3/2023?

Mohon maaf, Pak Ketua, kalau saya. Ya, *dirubah* menjadi Permendag 8/2024,36 *sorry*, 36/2023.

Iya, baik. Terima kasih.

*Billahi taufik wal hiidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik dari meja Pimpinan, Pak Bimo, silakan.

F-PDIP (ARIA BIMA, S.Sos):

Terima kasih, Pak Hekal.

**Pimpinan Rapat yang saya hormati,
Pimpinan Rapat, Kawan-kawan Anggota Komisi VI,
Pak Menteri Perdagangan, beserta
Seluruh jajarannya,**

Saya hanya mengingatkan kembali proses kerja sama perdagangan internasional, kenapa di dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 itu baru memasukkan perlunya adanya proses konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat? Bahwa di situ ditegaskan bahwa kita perlu kerja sama dengan perdagangan internasional, termasuk rapat hari ini kita ikut



membahas terkait dengan persetujuan preferensi perdagangan dengan Iran adalah jelas sekali penegasannya adalah untuk meningkatkan akses pasar kita, serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.

Itu tegas sekali dalam Undang-Undang Perdagangan disebutkan bahwa kerja sama adalah untuk melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Di dalam Pasal 282 ayat (1), "Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain, dan atau lembaga organisasi internasional". "Kerja sama perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan internasional". Dan setelah undang-undang inilah kemudian, kenapa DPR dilibatkan yang mana DPR di dalam Pasal 83, "Pemerintah dapat melakukan perundingan perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat".

Posisinya di mana sebenarnya DPR ini di dalam memberikan konsultasi, sebelum perjanjian itu dijadikan suatu undang-undang ataupun hanya berlaku dengan perpres saja. Tentunya penekanannya tetap pada Pasal 82, untuk melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Inilah yang menurut saya kenapa hari ini kita membahas tentang persetujuan preferensi perdagangan antara Indonesia dan Iran.

Kami percaya bahwa Pak Menteri beserta seluruh jajarannya, tujuan daripada PTA ini adalah untuk lebih meningkatkan ekspor kita, yang mana diharapkan dengan paparan yang ada, produk-produk Indonesia akan lebih banyak masuk ke pasar Iran dan negara-negara Timur Tengah. Terutama yang Pak Menteri tuliskan di sini adalah terkait dengan produk-produk yang menyangkut *oil* dan sumber daya mineral Iran yang yang saat ini sebenarnya cukup kuat produk *oil* di Iran yang harganya cukup kompetitif.

Itulah yang, yang perlu saya sampaikan kepada forum ini. Kita tetap berharap, dari aspek teknokratik teknis dan kalkulasi di dalam melakukan diplomasi perdagangan, saat ini kita melihat bahwa globalisasi dengan pasar bebas sudah tidak terlalu nampak lagi. Hampir setiap negara lebih mengedepankan berbagai hal yang terkait dengan kepentingan nasionalnya. Kita harapkan DPR pun saat ini juga mulai mencermati *balancing* perdagangan di dalam hal-hal yang menyangkut hubungan bilateral yang kita permanenkan dengan persetujuan preferensi perdagangan, itu akan lebih betul-betul mendapatkan posisi kita untung.

Selain itu, Pak Menteri. Ternyata dari berbagai jurnal yang kita baca, perjanjian bilateral yang terkait dengan persetujuan preferensi perdagangan juga bukan berarti kemudian kita bebas berdagang, bebas berdagang dengan berbagai fasilitas tarif. Banyak hal-hal yang saya kira perlu kita cermati, tidak hanya preferensi tarif, tapi banyak hal, justru hambatan-hambatan nontarif inilah yang muncul, seperti dengan China dengan Jepang, nontarif inilah yang saat preferensi tarif kita berikan ruang khusus atau preferensi khusus, hal-hal yang nontarif muncul dan sekali lagi ini tidak serta-merta kemudian mereka tidak paham.



Akhirnya, perdagangan ini kan yang muncul adalah perang dagang ya. Kita akan lihat kalkulasi *size* pasar yang lebih luas, itu oleh siapa gitu. Ini yang saya tekankan pada siang hari ini.

Misalnya, di Iran kurang lebih 80 juta, kita 270 juta. *Size* pasar kita jauh lebih besar, tapi memang kita tidak boleh apa, *kuiper* atau tidak boleh kita menutup diri. Kita harus melakukan berbagai hubungan yang inklusif dengan prinsip bebas aktif, kita bebas berdiplomasi atau bekerja sama dengan seluruh negara manapun. Tetapi kita tetap aktif di dalam mewujudkan satu perdagangan yang lebih adil. Dan sekali lagi, bahwa kepentingan nasional, tentu yang bisa memitigasi adalah kawan-kawan dari birokrat, dari kementerian, bahkan berbagai diplomasi untuk bicara *apple to apple*, produk per produk, itu harus betul-betul lebih *rigid*.

Sekali lagi bahwa saya menyetujui atau juga mengapresiasi bagaimana PTA ini ya, perlu diratifikasi dan tentunya, walaupun hari ini kita hanya menyetujui perpres, tapi kita harapkan, kita harapkan ratifikasi oleh kedua parlemen itu juga harus kita tingkatkan supaya berlaku efektif. Dan kita berharap, pembahasan dan persetujuan semacam ini tentu hal-hal yang lain akan lebih mempunyai waktu untuk lebih mendalami, karena ini disetujui bulan Mei dan kemudian kita Pemilu, mungkin DPR-nya juga tidak terlalu banyak waktu ya untuk membahas lebih dalam.

Pembahasan-pembahasan biasanya kalau memang ada waktu, kita akan lebih bicara tantangan dan peluang yang ada. Dan kita harapkan perjanjian-perjanjian yang selalu kita tandatangani, kedua negara biasanya menyampaikan banyak hal tentang peluang. Dan hal-hal yang dibahas selain terkait dengan masalah-masalah hambatan tarif atau hal-hal yang terkait dengan tarif, hal-hal yang menyangkut standar-standar produk pun seperti dengan China, walaupun kita sudah menandatangani *Asian China Community* yang di dalamnya adalah Indonesia, tetapi, terkait dengan masalah kesehatan, terkait dengan berbagai hal, itu sering dikemukakan.

Maka, kita berharap perjanjian-perjanjian semacam ini yang banyak hal justru setelah itu muncul hambatan nontarif, kita bisa atasi dengan berbagai cara untuk melakukan diplomasi.

Indonesia dan Iran merupakan negara yang cukup strategis. Kita berharap dengan memperluas hubungan internasional, bilateral antara Iran dan Indonesia, kita harapkan peningkatan ekspor Indonesia ke pasar ikan akan semakin meluas dan kita berharap implementasinya harus efektif, efek ke Indonesia terutama dan PTA ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua negara.

Saya kira itu. Terima kasih, Pak Hekal.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Pak Martin, terus tadi Pak Darmadi mau *nambahin* atau mau Darmadi dulu.

Ya, 30 detik. Iya 30 detik *nih* biar di.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Saya 1 detik, Pak Menteri.

Dalam kesempatan ini, karena ini masalah Pak Menteri mau keluarkan permendag baru ya, atau apapun *lah*. Ada baiknya Pak Menteri kita adakan waktu, usulan dari Anggota Dewan gitu, supaya lebih komprehensif, Pak Menteri. Kita buka-bukaan *aja* nanti ya. Kenapa salahnya, dosanya kementerian lain di mana, salahnya dosa kementerian lain di mana. Ini *kan* enggak persis Pak Menteri, kita tahulah, kita enggak sebut karena menyangkut partai lain kan.

Ya. *Oh* ya kementerian lain.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Kementerian, Bos, kementerian, Bos.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Jadi, ada saya *udah* menampung 60 asosiasi, Pak.

Tekstil kita tahulah ya, tekstil ini, itu *udah* zaman dulu mau bangkrut, Pak. Ya, bukan sekarang gara-gara permendag mau bangkrut, bukan, Pak, ya. Jadi, orang banyak *nyalahin* Bapak, saya bela Bapak, Pak, kali ini, Pak. Karena, sebelah saya Hakim, Pak.

Jadi, Pak Menteri, ada satu waktu usulan, kita semua kuasai asosiasi, Pak, di sini. Ya, kita tahulah semua, Pak. Jadi kita mau memberikan usulan, di samping Bapak nanti *ngomong* sama asosiasi. Ini waktunya enggak cukup, saya tahu. Enggak usah kita bahas detail, Pak ya.

Nah, ini yang kita harapkan. Kalau ada FGD *lah*, Pak. FGD di mana kita lakukan, sebelum Bapak keluarkan kebijakan. Ini pro kontra luar biasa, Pak, di pasar, Pak. *Ngeri*, Pak.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):



Pak, tadi kita sepakat enggak keluar dari konteks.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Enggak, enggak, ini saya minta waktu, Pak.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Minta waktu, Pak.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Urgent sekali kan?

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Urgent untuk FGD.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tiga puluh detik *kan* tadi?

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Satu detik. Jadi, itu usulan saya Pak Menteri ya. Jadi, kita bahas, ini buka-bukaan *aja* lah, Pak, *gitu*.

Makasih, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, Pak Martin, silakan.

WAKIL KETUA (H.P. MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, *makasih*, Pak Hekal.

**Yang saya hormati Pak Menteri,
Pak Wamen,
Pak Sekjen,**



Ini karena perjanjian dagang.

Dirjen PPI, juga sahabat saya di situ, Pak Bara Hasibuan,

Pak Menteri, pertama saya ucapkan selamat, ini sudah bisa ditandatangani, karena kebetulan saya mengikuti juga sedikit banyak ketika ini pembahasan ya. Pada waktu itu Pak Jokowi ya. Kita juga kunjungan Pimpinan DPR, saya ikut, diajak sebagai Pimpinan Komisi VI untuk mendorong juga PTA ini.

Nah, yang ingin saya sampaikan ke Pak Menteri, beberapa hal pada saat kunjungan itu sebenarnya juga menarik ya, cuman saya enggak tahu mungkin ada hambatan geopolitik atau apa.

Iran juga punya apa, teknologi, kerja sama teknologi yang mungkin bisa dijajaki dari sisi nanoteknologi, kesehatan ya, dan juga farmasi. Karena kita juga menghadapi banyak sekali ketergantungan kita untuk produk-produk farmasi dari luar negeri. Dan tampaknya kalau kita tidak *mendiferensiasi* kebutuhan farmasi kita dari berbagai negara, kita akan mudah sekali untuk tergantung.

Nah, saya rasa ini bagus, Pak, untuk kita terus dalam, kalau memang dari PTA ini bisa meningkat ke CEPA, ya. Ini akan baik dan menyeimbangkan juga, Pak. Kita sebagai negara dengan politik luar negeri yang bebas aktif, ya kita membuktikan itu di mata dunia juga, kalau ini bisa terus meningkat.

Jadi itu, Pimpinan. Saya singkat *aja*. Saya kasih apresiasi untuk Pak Menteri dan seluruh jajaran Kemendag.

Pak Sarmuji.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, silakan di lanjut, Pak Sarmuji.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih, Pak Hekal.

Saya sedikit *aja*, Pak Menteri. Sebagian besar dari orang itu menganggap kalau ada kerja sama dengan negara lain, kita keuntungan yang bisa kita dapat itu adalah keuntungan kita bisa mengeksport barang kita dalam jumlah yang lebih banyak, tapi bagi saya tidak hanya itu. Justru, kalau kita bisa mengimpor produk dari negara yang kita bisa kerja sama dengan harga yang paling murah, itu juga suatu keuntungan yang sangat besar.

Iran punya komoditas yang sangat baik ya, punya gas yang melimpah, minyak yang melimpah, yang selama ini ada hambatan. Suka atau tidak suka ada hambatan, baik itu menyangkut urusan politik, maupun urusan yang lain-lain. Oleh karena itu, kita berharap melalui kerja sama ini, kalau bisa hal-hal yang menjadi hambatan kita untuk memperoleh barang dengan harga yang lebih kompetitif, itu hilang dari, dengan kerja sama ini.

Tadi Pak Martin sudah sampaikan ada teknologi nano dan sebagainya. Ada teknologi yang bersifat pertahanan juga. Drone Iran itu sangat terkenal. Drone Iran, Turki, itu sangat terkenal, memiliki kemampuan teknologi yang sangat tinggi. Manfaat yang seperti itu juga mesti kita dapatkan, bukan hanya mudahnya kita mengeksport barang-barang kita, tetapi mudahnya juga kita memperoleh barang-barang yang lebih memiliki nilai yang kompetitif dalam pengertian yang lebih murah untuk dalam negeri kita.

Barangkali itu, sedikit saja, Pak Hekal.

Terima kasih.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik, kami beri kesempatan Pak Menteri menanggapi. Silakan, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih.

**Pimpinan,
Anggota Komisi VI yang terhormat,**

Saya, tadi ada beberapa kawan-kawan yang menyampaikan kekhawatirannya, tentu saya maklum, karena ada geopolitik ya. Tentu kita memang berhati-hati. Tetapi hambatan-hambatan itu kadang-kadang itu juga sekaligus peluang. Sekarang perdagangan ini masuk fase tidak mudah, kalau dulu Barat kebanyakan perdagangan bebas gitu ya, sekarang yang paling menghambat mereka.

Tentu tidak hanya tarif, Pak Arya Bimo. Sekarang itu banyak sekali hal-hal yang bukan tarif sebetulnya, tetapi dengan perjanjian itu kita bisa menganulir, gitu. Misalnya sekarang, sekarang Pak Jokowi lagi *push* agar selesai, 8 tahun enggak ada kemajuan, itu mudah-mudahan selesai, misalnya dengan Uni Eropa.



Uni Eropa itu banyak sekali, Pak, hambatan tarifnya. Jadi, sekarang itu memang terjadi perkembangan yang menarik di dunia, bukan perdagangan bebas tapi negara masing-masing berlomba-lomba itu menghambat, menghambat. Jadi, dia mengutamakan kepentingannya masing-masing ya atau juga kelompoknya Pak, karena dibagi sekarang kan. Ada yang Barat, ada yang Timur, *gitu* ya.

Tapi di tengah-tengah itu semua sebetulnya kita punya peluang. Nah, dalam perdagangan yang ketat seperti ini, yang tidak mudah itu, tentu kalau kita mengandalkan tidak kreatif, mengandalkan itu-itu saja, kita enggak bisa, enggak bisa berkembang dengan cepat.

Oleh karena itu, segala peluang itu kita manfaatkan, kita optimalkan. Tentu tadi yang tidak, pasti, yang tidak akan merugikan kita. Misalnya dengan Iran ya, kenapa kita tidak CEPA? Oleh karena itu, kita preferensial Pak, terbatas. Ada, ada hal-hal yang enggak diperbolehkan secara umum, ya kita enggak masuk, kita yang tertentu saja, yang bisa, dan bisa ya itu bisa meningkatkan perdagangan kita. Itu celah, untuk meningkatkan volume ekspor kita. Oleh karena itu, tidak CEPA, jadi dia terbatas, ini terbatas. Yang tadi misalnya, ada penghapusan tarif, cuma kita 33 pos tarif, dia menghapus 88. Bidang-bidangnya juga tertentu. Yang tidak diperbolehkan oleh barat, ya kita yang internasional tidak setuju, ya kita juga tidak. Tetapi juga ada peluang. Misalnya dengan Rusia itu ya. Kita kalau takut terus *kan* susah juga, kan sebetulnya ada juga yang enggak dihalangi tapi kita juga takut, itu enggak perlu. Misalnya impor minyak, kita hanya bayar 60 dolar, Pak, dengan Rusia, tapi kita enggak mau. Kenapa? Takut. *Kan* enggak boleh dagang, takut, masa dagang takut, *gitu*. Karena, kalau kita beli dari Rusia tidak ada yang dilanggar dan tidak ada yang perlu ditakuti, karena aturannya boleh, Pak. Tapi, kita bayar 60 dolar, *gitu*.

Amerika boleh, orang Eropa *aja* beli, Pak. Eropa beli, minyak dari Rusia, beli, gas dari Rusia, beli, Pak. Kita takut, kita masa kita beli lebih mahal daripada lebih murah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita enggak bayar, ya kita juga bisa jualan produk kita. Itu maksud saya, potensi untuk meningkatkan perdagangan, *nampaknya* sulit, tapi sebetulnya enggak. Itu bisa meningkatkan perdagangan kita, orang lain yang tidak, kita bisa kerjakan.

Contoh itu ya, dengan Rusia itu tidak ada yang pelanggaran apapun, kita membeli gas, kita membeli minyak dengan harga murah, karena memang aturan internasional, perjanjian, diperbolehkan. Bahkan Eropa, Amerika juga ada yang beli produk-produk dari Rusia, jadi enggak ada masalah. Itu contoh, Pak, ya.

Berikutnya, Pak. Pertanian kenapa *sih* melonjak-lonjak terus ya. Begini, Pak, dari dulu ini Pak Aria Bimo ini paling keras di sini. Dari dulu kita *ngomong* swasembada gula, betul enggak, Pak. Ini ribut terus sama PTPN kita *nih*, Pak, dulu di sini. Tahun berapa itu, tahun 84 ya, Pak ya? *Eh*, tahun 2004. Sampai sekarang bukan lebih baik, lebih berat.



Nah jadi kalau kita lihat sejarah, Pak, Eropa itu sampai ke sini menemukan Amerika, menemukan Australia, karena daerahnya sempit, sudah. Kalau kita pertanian kita, Pak, *ngandalkan* Jawa, kita mau sampai ke mana? Mau swasembada gula itu kapan, mau swasembada beras itu kapan, *wong* tanahnya enggak ada, Pak. Yang ada juga berubah jadi pabrik, berubah jadi perumahan. Jadi, kalau kita bermimpi swasembada gula, swasembada beras segala macam di Jawa, enggak mungkin, menurut saya ya, mustahil dengan teknologi apapun. Tapi, kita punya masa depan, Pak, seperti Barat tadi. Itu buktinya Amerika maju, dulu belum ada orang, Pak. Australia maju, dulu juga belum ada orang.

Nah, kita punya masa depan. Ini yang saya sampaikan ke Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Masa depan kita di Kalimantan dan di Papua, yang besar tanahnya, Pak. Kita bisa bikin mekanisasi apa jagung, apa tebu, apa beras. Memang enggak mudah, Pak. Enggak mungkin hari ini *bikin*, terus besok swasembada, ya tidak Pak. Pengalaman dulu, kadang-kadang gagal dulu, *gitu* ya. Tapi masa depan kita yang luas itu ada di Kalimantan dan ada di Papua. Selagi itu, kita tidak optimalkan., menurut saya, swasembada gula, swasembada beras itu sulit. Mungkin retorika, *gitu* ya. Karena lahannya tidak ada. Jadi, harga akan tergantung dari luar. Kalau luar melarang apa, ekspor beras, India, ya harga kita naik, Pak, karena kita tergantung sama orang. *Gimana* dia tahan *aja*, Pak, *gitu*, *udah*, pasti naik, *gitu*, Pak.

Jadi, memang masa depan kita dan Pak Presiden, Pak Prabowo juga setuju, masa depan kita ada di Papua dan di Kalimantan. Di situ kita bisa bikin mekanisasi. Mudah-mudahan 5 tahun, gula, beras bisa, kalau kita serius ya, dan didukung oleh teman-teman dari DPR.

Apalagi tadi ya. Geopolitik, hati-hati, pasti kita hati-hati sekali, karena kita memang harus mengikuti aturan-aturan, tapi sebetulnya dalam tadi itu, dalam hambatan-hambatan kita peluang banyak ya, dan jangan salah seperti Ethiopia itu, sekarang, dulu dulu busung lapar ,sekarang maju, Pak. Bukan maju, berkembang *gitu*. Itu juga pasar. Karena kalau kita berebut pasar yang sama dengan Tiongkok, dengan Vietnam, dengan, *loh*, Pak, Thailand tuh Pak, durian *aja* bisa 5 miliar dolar, Pak, durian. Sama dengan CPO, durian, Pak, *gitu*. Jadi, kita juga sebetulnya banyak hal yang bisa kita kembangkan.

Tarif 200 dan Permendag, Permendag Nomor 8. Saya cerita lagi, Pak, ya. Saya sudah pernah cerita di sini. Jadi, 6 bulan yang lalu, karena saya kalau di Perdagangan itu saya intens, saya serap sampai dalam, Pak, sampai mengerti betul, sampai masalah yang dirasakan. Oleh karena itu, kita dialog banyak, sehingga bisa *ketemu* benang biru atau benang merahnya, *ketemu* itu, tahu soal, *gitu*.

Memang, kalau seperti Pak Jokowi, presiden kita, *detil gitu*, kalau enggak, enggak *ketemu* Pak. Nah, kalau yang enggak *ketemu* itu, Pak, biasanya jarang, enggak mendalami. Nah oleh karena itu, saya 6 bulan yang lalu saya *udah* tahu, ini perdagangan kita kayak begini, ada beberapa hal

yang perlu kita perbaiki, antara lain pada waktu itu yang kita temukan tuh *post border*, Pak.

Post border itu membuat produk-produk impor enggak terkendali, karena enggak ada, enggak diperiksa, masuk saja, masuk saja, Pak. Bisa langsung ke toko, langsung orang ke per orang, ke mana, bebas, Pak, *gitu*. Itu tentu tidak terkendali.

Oleh karena itu, saya sampaikan ke Presiden, Pak, ini perlu kita atur. Presiden perintah kendalikan, rapat kabinet. Rapat kabinet dipimpin presiden langsung, semua menteri datang. Ada tambahan, selain *post border*, *border* tambahan minta khusus PMI. PMI minta agar barang yang mereka bawa enggak *dikenain* pajak, disepakatilah 1.500 dolar, tapi tiga kali, 500, 500, 500, ya.

Nah kemudian, dalam pengalihan barang itu, ada beberapa produk juga harus dilihat, seperti pakaian, barang-barang apa namanya, konsumsi apa, barang-barang istilahnya apa, konsumsi atau, *hmm*, iya yang dagangan lah ya. Kalau itu *kan* makanan, kalau pakaian itu termasuk barang apa, produk apa, elektronik, *gitu* ya. Konsumen, barang-barang konsumen, barang-barang konsumen, barang konsumen ya, itu di masuk itulah namanya pakaian jadi, elektronik, *beauty* ya, keramik, dan lain-lain, Pak. Masuk dalam situ, yang harus dikendalikan, *gitu*. Nah, rapatlah di Menko, Pak. Kata PMI, yang rapat PMI, Pak, PMI datang, Bea Cukai datang, semua datang. Kita ini sebetulnya badannya saja, karena impor-impor, kita rumahnya, *gitu* ya. PMI mengatakan, kalau 500 terlalu kecil, maka dihasilkanlah 56 item. Kalau 56 item mungkin nilainya lebih banyak dari 500. Kalau 500 terlalu sedikit, jadi disebutlah 500 item. Permintaan mereka, Bea Cukai, setuju, *oke* itu. Kita *kan* cuma rumahnya permendag itu, ekspor impor.

Udah, kemudian Perindustrian minta. "Oh, kalau *gitu* ini harus dikendalikan". Ada hampir berapa ribu itu harus ada perteknya, *gitu* Pak. "Oke, ini untuk kebaikan, jadi". Lahirlah Permendag Nomor 7 ya. Jadi dari 36 ya, 36 jadi nomor 7 *eh*, 36 dulu jadi, yang tadi masuk itu semua, habis itu 36 jadi. Habis itu komplain, PMI, marahnya sama kita. Yang *ngusulkan* mereka, ada Bea Cukai, sekarang enggak bisa jalan. *Gimana* caranya *meriksa* 56 item itu, *numpuk* barangnya. *Numpuk*, marah-marah tenaga kerjanya, yang dimarahi saya. Ya sudah, risiko jabatan, Pak, apa boleh buat? W walaupun bukan urusan saya, *gitu*. Itu cerita yang pertama. Jadi, Permendag 36, Permendag Nomor 7. Saya *gapapa* dimarahi, enggak masalah *gitu*, tapi ceritanya begitu.

Nah, Permendag 7 jalan, saya ikut perundingan, karena penting. *Market share* kita 70% di APEC. Oleh karena itu, walaupun jauh, saya pergi, Pak, ke Peru ya. Jam 2 pagi, saya enggak ikut rapatnya Pak, saya enggak ikut sidangnya ya. Saya lagi di Peru, jam 2 pagi saya *ditelfon*. *Nih* yang *telfon* Pak Wamen, bagaimana enggak diangkat, Wamen yang *telfon*, jam 2 *udah* bangun, sambung sama Pak Menko. Presiden marah, rapat terbatas di istana. "Itu Permendag 7 harus *dirubah* malam ini, kalau saya enggak bisa tanda



tangan, PLT saya, Pak Menko, yang akan tanda tangan”, karena barang di Priuk *numpuk* 26.000, enggak bisa keluar.

Saya enggak ikut rapat, Pak. Saya bilang, “Pak Menko, *kan* saya menterinya, masa saya enggak *teken*”, jadi saya *teken* lah dari Peru. Jadi, pertek-pertek itu dihapus, dikeluarkan lagi, jadilah Permendag 8. Itu ceritanya.

Jadi, Perindustrian sudah, Pak, sudah dikasih untuk mengatur ya, mengatur, semuanya lah diatur oleh pendustrian, tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti PMI tadi. Dikasih 56 item, enggak bisa jalan *gitu*, ya kan, itu, Pak. Sampai Ibu Menteri Keuangan, Pak Menko ke Priuk *tuh*. Dikasihlah relaksasi 1 bulan hampir 2 bulan, jadi barang yang numpuk itu boleh keluar lancar, kira-kira *gitu*.

Nah, mungkin itu juga akhirnya Perindustrian teriak, *kok* barang banjir *gitu*? Karena memang ada relaksasi. Berapa? Berapa bulan? 10 Maret sampai 17 Mei, jadi 1 bulan seminggu ya. Itu putusan diputuskan rapat terbatas. Saya menteri, Pak. Kalau saya menteri, apapun putusan presiden, saya harus ikut.

Jadi, Permendag jadi, saya lagi di Peru, jadilah Permendag 8 yang menghapus pertek-pertek yang baru, yang lama tidak, Pak, TPT tidak. Jadi, kalau tekstil mengatakan, “Kita bangkrut gara-gara Permendag 8”, ya enggak benar. Karena itu enggak dihapus, tetap ada. TPT tetap, Pak, tetap ada perteknya, macam-macam, yang baru tadi. Yang tambahan-tambahan baru, itu yang dihapus, misalnya bedaklah, macam-macam itu. Ya, itu *udah* dihapus.

Hmm? Ya, itu. *Lah* ya itu, ya prinsipnya barang *numpuk* katanya di situ, ya sudah, Pak. Jadi, jam 2 pagi, saya tanda tanganlah, lahirlah Permendag Nomor 8 ya. *Oke*.

Nah, tadi terkait dengan Pak Harris, bagaimana *tuh* yang 200%. Nah, ini, ini memang, jadi dalam satu sambutan yang panjang, memang kadang-kadang, Pak, kalau wartawannya itu wartawannya mendalami di bidang ini, dia *nulis*-nya tepat. Yang lain bukan enggak tepat, cuman enggak pas *aja*, *gitu*. Tapi, kalau CNN, CNBC, dia memang wartawan ekonomi, Pak, mengerti, *gitu* ya. Tapi, kalau wartawan politik *nulis* ekonomi, nah itu memang, yang hebohnya dulu, Pak, biasanya *gitu*. Ya, *kan*, yang hebohnya dulu. Tapi, kalau Bapak CNN baca, CNBC baca, itu pas, *gitu*.

Nah, jadi *gini*, rapat, saya pulang ke dari sana, rapat lagi, Pak, rapat lagi dipimpin Pak Presiden. Usulan dari Menteri Perindustrian, agar pertek masuk lagi, permendag dirubah lagi. Saya bilang saya, “Saya keberatan”, ya. Ya, kalau saya, *bikin* peraturan sendiri, jangan Permendag terus, *kan* saya yang jelek, Pak, iya *kan*. Orang yang tendang kontainer *kok* saya yang jelek itu *gimana* sih, saya enggak *ngerti*, Pak, ya *kan* saya enggak *ngerti* itu, *gitu*. Kita kerja ya kerja seadanya. Maksudnya, ya, apa, apa yang diperlukan, *gitu* ya, enggak ada di balik udang, apalagi di balik batu, enggak ada, Pak.



Nah terus, rapat lagi, Pak. Saya bertahan, saya bilang, ada cara lain, belum tentu pertek itu akan menyelesaikan masalah, *gitu*. Oleh karena itu, saya menolak keras, waktu itu, akhirnya presiden setuju, enggak jadi bikin permendag lagi, *gitu*.

Nah oleh karena itu, kita akan lihat, akan lihat, apakah betul 3 tahun terakhir ini yang menyebabkan industri rontok dan lain-lain itu, gara-gara barang impor. Oleh karena itu, urusannya ini diserahkan kepada komite, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Pak.

Nah, dia akan lihat nanti diselidiki, 3 tahun terakhir kayak apa data-data kita. Kalau memang melonjak impornya, produk-produk yang tujuh macam tadi itu, maka dia bisa kenakan tarif, Pak, bisa 10, bisa 20, bisa 200. Bisa saja, terserah mereka, bukan saya *entukan*. Itu namanya nanti kalau Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, *output*-nya itu dia masuk, tindakan pengamanan, itu *output*-nya, Pak.

Ada satu lagi, namanya KADI, Komite Anti Dumping Indonesia. *Output*-nya nanti, dia masuk, anti *dumping*. Mereka juga akan lihat, Pak, data BPS, asosiasi dipanggil, dilihat, data impor bagaimana, masuknya melonjak-lonjak enggak, *gitu*, baru nanti mereka sidang, ada putusannya, Pak. Dan itu bisa *disue*, Pak, dan ini bukan soal balas-membalas, Pak. Seluruh negara boleh begitu.

Jadi, kalau Tiongkok menerapkan *gitu*, Jepang menerapkan *gitu*, Amerika, itu memang boleh. WTO, *oke*. Kalau menghancurkan (*suara tidak jelas*), boleh, Pak, tapi ada prosedurnya. Jadi, KAPI, *eh* KPPI tadi *output*-nya dia masuk, tindakan pengamanan, kalau KADI *output*-nya, dia masuk, anti *dumping*, yang mereka akan lihat.

Nah, sekarang belum. Yang sudah, TPT, TPT sudah ada, Pak, sudah ada, hanya memang belum disetujui oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, saya bersurat lagi, kemarin Menteri Keuangan sudah setuju, tinggal sekarang *nunggu* surat dari Perindustrian. Pak Agus saya telepon, Pak, saya aktif, saya telepon dua kali, katanya kemarin, hari ini belum sampai suratnya. Nanti saya telepon lagi, *gitu*. Saya kalau kerja *kan* enggak bisa lama-lama, Pak, kalau *udah* ya cepat, *gitu*. Selesai sudah, kita bisa kerja yang lain.

Nah, itu yang sudah disepakati, satu, satu, TPT sudah. Kemudian pakaian, jadi tinggal perpanjangan. Kemudian keramik, Pak, itu sudah, *gitu* ya. Tarifnya berapa, nanti saya akan lihat hasil kerja mereka, tapi kata mereka mengatakan, sudah, tinggal akan laporan kepada Kemendag, buat surat, nanti surat ini baru kita tembuskan ke Perindustrian dan apa namanya, kementerian, Kementerian Keuangan.

Jadi, Pak, itu yang betul, ada KPPI, ada KADI, yang akan dinilai secara komprehensif dan itu berlaku untuk seluruh negara, tidak hanya negara A, negara B, tapi semua berlaku, Pak, *gitu*.



Saya kira, saya kira itu ya, apalagi ya tadi ya? Sudah semua Pak, *udah, udah* semua.

Saya kira, *gitu*, Pak.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Pak Pimpinan.

Usul *nih*, ada baiknya KPPI sama KADI kita undang *aja*, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Boleh, bagus juga.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Supaya kita kasih tahu juga, belum tentu dia dapat informasi yang benar juga, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Bagus. Jadi, Pak, saya juga mendalami, kita undang beberapa asosiasi, memang pada akhirnya yang ditemukan itu, yang legal sebetulnya mereka enggak begitu *anu*, Pak. Jadi, masalah utama itu sebetulnya, apakah ini ilegal atau tidak, tetapi banyak sekali produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, Pak, ya, kaos. Itu kalau masuk ke sini, Pak, itu dikenakan Rp60.000,00. Jadi, kalau *udah kaos* impor harganya 50.000, enggak mungkin. Berarti itu, itu enggak betul cara masuknya, enggak *ngerti*, pokoknya itu enggak betul. Karena, kalau kaos masuk ke sini, Pak, itu satu *piece, piece* ya, satu *piece* ya, dikenakan tarif 60.000, ini *kok* dijual 50.000, *gitu*. Itu satu contoh, Pak, ya, dan juga ada beberapa hal.

Oleh karena itu, tadi kesimpulan kita, sementara, nanti akan dimatangkan lagi. Kita akan bikin satgas bersama asosiasi, bersama asosiasi kita bikin satgas, sama Lembaga Perlindungan Konsumen, yang Bapak-Bapak pilih kemarin, ya, bersama Kemendag. Kita akan lihat nanti ke pasar, survei, lihat apa yang terjadi. Nah, betul enggak ini ada yang ilegal. Kalau kita *nuduh* ilegal, belum tentu juga *kan*, Pak, kita lihat dulu. Ini kalau barang tertentu *kan* harus ada SNI-nya, pakaian-pakaian apa, wanita itu, harus ada SNI-nya *tuh*, pakaian anak-anak, itu harus ada SNI-nya, ada *nggak*, nanti akan dilihat. Kalau *nemu* enggak, berarti prosedurnya enggak masuknya, enggak, ilegal. Nanti, harga-harga produk-produk kaos *gimana* ya *kan*, kalau kena masuknya 60, ini kok ada barang impor harganya 50.000.

Nah ini, itu nanti iya. Jadi, kita akan *bareng-bareng* asosiasi, Lembaga Perlindungan Konsumen dan kita, nanti kalau teman-teman DPR ikut, dengan senang hati kami, ya *kan*, kalau bisa Anggota Komisi VI pas kita apa



namanya, ke pasar, Pak, *bareng-bareng*. Kita lihat *aja*, Pak, buktinya kayak apa gitu. Kayak kemarin saya di Jawa Timur, ada 5 juta *ceramic* tanpa standar gitu. Ketemu, Pak, empat, empat gudang besar *gitu* ya. Tentu itu akan mematikan industri.

WAKIL KETUA (H.P. MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Menteri, kalau yang di berita soal tarif 200% dari China itu.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Tadi sudah saya *jelasin*. Barusan saya *jelasin*, baru saya *jelasin*. Barusan saya, yang saya katakan KADI dan KPPI yang akan melihat, nanti 3 tahun *ntar* seperti apa, Merekalah yang menentukan tarif.

Nah, saya bicara itu boleh 50%, boleh 20%, boleh 100%, boleh 200%. Itu sebetulnya ujung saja, *gitu*. Ininya enggak dibikin, itu biasanya yang nulis wartawan politik, *gitu*. Kalau CNN atau CNBC, biasanya pas benar, karena dia orang ekonomi, Pak. Kalau yang politik *kan* dibaca dulu *aja* yang penting *rame, gitu*, apalagi judulnya misalnya.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Itu namanya *clickbait*.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Nah *gitu*.

Saya kira *gitu*, Pak Ketua.

Terima kasih.

Selamat sore,
Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik, terima kasih.

Kita tayangkan kesimpulan. Nanti Pak Darmadi mau undang siapa *aja*, a boleh Pak, masa sidang depan.

WAKIL KETUA (H.P. MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bikin daftarnya dulu, Prof.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

FGD dengan senang hati, Pak. Dengan senang hati, FGD dengan senang hati ya.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak. Baik.

F-PDIP (Prof (Asoc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Disetujui Pimpinan, FGD.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

Baik, ini *draft* kesimpulan Rapat Kerja Komisi.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Pak, sebentar, Pak.

Memang, Pak, yang Menteri Perdagangan itu risiko jabatan. Cabai naik, saya yang salah, Pak. Bawang naik, saya yang salah, beras naik ya, tomat yang naik pun, ya kita juga salah. Ya enggak apa-apa, Pak, risiko jabatan.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, ini kita bacakan *draft* kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI dalam rangka pembahasan terkait Rencana Pengesahan Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran (*Preferential Trade Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Iran*), Senin, 8 Juli 2024.

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri Perdagangan RI terkait dengan rencana Pengesahan Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran (*Preferential Trade Agreement*

between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic Islamic Republic of Iran).

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI menyetujui pembahasan terhadap Pengesahan Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran (*Preferential Trade Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Iran*) melalui mekanisme Peraturan Presiden atau Perpres.

Setuju ya, Pak?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk dapat memperhatikan aspek geopolitik, hambatan bersifat tarif dan nontarif, serta *size market* kedua belah, *market size* ya?

WAKIL KETUA (H.P. MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Market size, kebalik.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Market size kedua belah pihak di dalam Perjanjian Preferensi.

WAKIL KETUA (H.P. MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Apa *sih* tulisan itu? Ukuran pasar *aja* bikin. Dalam kurung, *market*.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Besaran pasar.

WAKIL KETUA (H.P. MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Besaran pasar, dalam kurung *market size*.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

WAKIL KETUA (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Besaran pasar.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Besaran pasar?

WAKIL KETUA (H.P. MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Besaran pasar, boleh dalam kurung, *market size*, *gitu*.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, agak kurang umum itu, tapi. Ya, *market size*.

WAKIL KETUA (H.P. MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Lain, lain.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

... Kedua belah pihak dalam Perjanjian Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran.

Setuju ya, Pak, ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan RI untuk.

Ini enggak perlu lah ya. Ini kita enggak enggak ada jawaban yang perlu ditanggapi, yang kita minta adalah pemerintah memperhatikan tadi *lah*, *concern-concern* yang sudah dibahas di ruangan ini.

Silakan, Pak Dirjen.

DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Izin, Pak.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Juru rundingnya mau bicara.

DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Di poin nomor dua ada salah ketik, *preferential*.

WAKIL KETUA (H.P. MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Apa tuh.

DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Di dalam kurung, poin nomor dua.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tayangin.

DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Dalam kurung itu.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yang mana.

DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Ditulis *prefential*, harusnya *preferential*.

WAKIL KETUA (H.P. MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Preferen.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):



Oh iya.

DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Preferen.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Coba, Mas.

DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Yang nomor 1 juga. *Preferential.*

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nomor 1 juga ya?

DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN:

Iya.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

N-nya kelebihan itu, yang di nomor dua. *Lah*, hilang lagi. *Oke*, tolong diperbaiki itu. Saya rasa cukup ya?

Baik, atas nama Pimpinan Komisi VI, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota dan kepada Pak Menteri beserta jajaran, atas raker pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih.

Dengan ini rapat saya tutup.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

((RAPAT DITUTUP PUKUL 16.27 WIB))

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

